

**Persepsi Masyarakat Dalam Implementasi Prinsip *Good Local Governance*
Pada Pengelolaan BUMDes**
(Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara)

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ELMA LASTIARMA PURBA

NIM : 23230002

**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

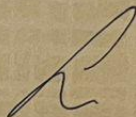
PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Elma Lastiarma Purba
NIM : 23230002

NAMA

TANDA TANGAN TANGGAL

Susi Fitria Dewi., Sos., M.Si., Ph.D.
Pembimbing

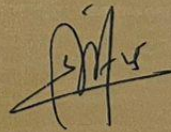


Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



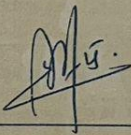
Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D.
NIP. 196604111990031002

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn)



Prof. Dr. Al. Rafni, M.Si.
196802121993032001

**PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

No	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Susi Fitria Dewi., Sos., M.Si., Ph.D.</u> Ketua	 _____
2	<u>Prof. Dr. Al Rafni, M.Si.</u> Anggota	 _____
3	<u>Dr. Junaidi Indrawandi, M.Pd.</u> Anggota	 _____

Mahasiswa

Nama : ELMA LASTIARMA PURBA
NIM : 23230002
Tanggal Ujian : 02 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elma Lastiarma Purba
Nim : 23230002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul *“Persepsi Masyarakat dalam Implementasi Prinsip Good Local Governance dalam Pengelolaan BUMDes (Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara)”* adalah benar dan merupakan karya tulis saya sendiri. Karya ini bukan merupakan plagiat dari karya orang lain kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik di instansi unip maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Maret 2025
Saya yang Menyatakan,

Elma Lastiarma Purba
23230002

KATA PENGANTAR

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kekuatan yang diberikan hingga tesis berjudul *“Persepsi Masyarakat dalam Implementasi Prinsip Good Local Governance Pada Pengelolaan BUMDes (Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara)”* ini dapat diselesaikan. Peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam kesempatan ini, penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Krismadinata, S.T, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Prof. Dr. Al Rafni, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Susi Fitria Dewi, Sos., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing dan mengarahkan untuk penyempurnaan dalam tesis ini.

5. Ibu Prof. Dr. Al Rafni, M.Si (Kontributor I) dan Bapak Dr. Junaidi Indrawandi, M.Pd (kontributor II) selaku penguji I dan penguji II selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen Staf Administrasi Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
7. Kepada orang tua tercinta, Bapak (Panto Purba) dan Mama (Serianto Lumbantoruan) dan adik-adik (Kidung Agung Purba, S.T, Sugiarto Hamonangan Purba, Amd.Kep, Paskah A. Purba) terima kasih atas segala kasih sayang kalian, doa dan dukungan yang tak pernah henti dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Sastra Wijaya Nababan, S.E. Terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dan yang sangat tulus membantu serta memberikan motivasi selama pembuatan tesis ini.
9. Perangkat BUMDes di Desa sabungan Nihuta II beserta jajarannya yang membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.

Padang, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN AKHIR TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
A. Kajian Teori	11
1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (<i>Good Local Governance</i>).....	11
a. Pengertian <i>Good local governance</i>	11
b. Prinsip- Prinsip <i>Good Local Governance</i>	13
c. Relevansi <i>Good Local Governance</i> terhadap pengelolaan BUMDes.	16
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	18
a. Definisi, Maksud dan Tujuan BUMDes	18
b. Kebijakan Otonomi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	21
B. Penelitian Relevan.....	24
C. Kerangka Konseptual	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Populasi dan sampel penelitian.....	34
E. Instrumen penelitian.....	36
F. Teknik pengumpulan data.....	37
G. Teknik analisis data.....	45

BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Temuan Umum	54
1. Gambaran umum BUMDes “ Martabe “ Sabungan Ni Huta II	54
a) Sejarah Berdirinya BUMDes Martabe sabungan.....	54
b) Profil BUMDes	57
c) Struktur Organisasi dan Kepengurusan.....	58
d) Unit usaha BUMDes	59
f). Manfaat bagi Petani.....	60
B. Temuan Khusus	61
1. Persepsi masyarakat terhadap Prinsip- Prinsip <i>Good local Governance</i> dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan	62
a. Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Transparansi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan.....	62
b. Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan.....	67
c. Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan.	71
d. Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Efisiensi dan Efektivitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan.	76
e. Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Supremasi Hukum (<i>Rule of Law</i>) dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan.	80

2. Tantangan dan Hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi di Desa Sabungan	85
a. Tantangan dalam Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Transparansi dalam pengelolaan BUMDes	86
b. Tantangan dalam Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes	89
c. Tantangan dalam Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan BUMDes Martabe	92
d. Tantangan dalam Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas dalam pengelolaan BUMDes	95
e. Tantangan Penerapan Prinsip Supremasi Hukum dalam pengelolaan BUMDes	103
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk efektivitas dan keberlanjutan BUMDes di Desa Sabungan.....	108
a. Strategi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	108
b. Strategi Prinsip akuntabilitas dalam Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	113
c. Strategi Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	117
d. Strategi Prinsip Efisiensi dan Efektivitas dalam pengelolaan BUMDes Martabe berdasarkan persepsi masyarakat	121
e. Strategi Prinsip Supremasi Hukum dalam pengelolaan BUMDes Martabe berdasarkan persepsi masyarakat	124

C. Pembahasan.....	129
BAB V	145
PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Klasifikasi Informan Penelitian di Desa sabungan	34
Tabel 3. 2 Sampel.....	36
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Angket tentang Tata Kelola BUMDes	38
Tabel 3. 4 Rentang jawaban	39
Tabel 3. 5 Kriteria Persentase	40
Tabel 3. 6 Klasifikasi Informan Penelitian di Desa Sabungan.....	44
Tabel 3. 7 Rata-rata persepsi masyarakat dalam Implementasi prinsip Good local governance	46
Tabel 3. 8 Uji Validitas item transparansi.....	48
Tabel 3. 9 uji Validitas item Akuntabilitas	49
Tabel 3. 10 uji Validitas item Partisipasi	49
Tabel 3. 11 uji Validitas item efisiensi dan efektivitas	49
Tabel 3. 12 uji Validitas item supremasi Hukum.....	50
Tabel 3. 13 Hasil Uji Reabilitas	50
Tabel 4. 1 Identitas BUMDes.....	58
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi	59
Tabel 4. 3 Jenis Usaha Pupuk BUMDes	60
Tabel 4. 4 Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Transparansi	63
Tabel 4. 5 Pernyataan mengenai Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Transparansi	64
Tabel 4. 6 Distribusi frekuensi prinsip Transparansi dalam pengelolaan BUMDes	65

Tabel 4. 7 Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Akuntabilitas	68
Tabel 4. 8 Pernyataan persepsi masyarakat terhadap Prinsip Akuntabilitas	68
Tabel 4. 9 Distribusi frekuensi persepsi masyarakat terhadap prinsip Akuntabilitas	69
Tabel 4. 10 Persepsi masyarakat terhadap prinsip Partisipasi Masyarakat	72
Tabel 4. 11 Persepsi masyarakat terhadap prinsip Partisipasi Masyarakat	72
Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Persepsi masyarakat terhadap prinsip Partisipasi Masyarakat	74
Tabel 4. 13 Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	76
Tabel 4. 14 Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	77
Tabel 4. 15 Distribusi Frekuensi Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	78
Tabel 4. 16 Persepsi masyarakat terhadap prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law)	80
Tabel 4. 17 Persepsi masyarakat terhadap prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law)	81
Tabel 4. 18 Distribusi frekuensi Persepsi masyarakat terhadap Prinsip Supremasi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 BUMDes Martabe, Kecamatan sipahutar.....	54
Gambar 4. 2 Usaha BUMDes Martabe, Kecamatan Sipahutar	56
Gambar 4. 3 Fasilitas Viar BUMDes Martabe, Kecamatan Sipahutar	56
Gambar 4. 4 Modal yang tidak kembali.....	100
Gambar 4. 5 Interaksi penjual dan pembeli	106
Gambar 4. 6 Pertemuan pengurus BUMDes dengan BPD dan Pemerintah daerah	112
Gambar 4. 7 sosialisasi Rutin Kinerja Pengurus	113
Gambar 4. 8 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Masyarakat	120
Gambar 4. 9 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Masyarakat BUMDes dalam mendapatkan modal tambahan	123
Gambar 4. 10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	127

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1 Diagram lingkaran prinsip Transparansi	65
Diagram 4. 2 Diagram lingkaran Penerapan prinsip Akuntabilitas	69
Diagram 4. 3 Diagram lingkaran Penerapan prinsip Partisipasi Masyarakat.....	73
Diagram 4. 4 Diagram lingkaran Penerapan prinsip Efisiensi dan Efektivitas.....	78
Diagram 4. 5 Diagram lingkaran Penerapan prinsip Supremasi Hukum	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	154
Lampiran 2 Format Perbaikan Seminar Proposal	158
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	160
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian	162
Lampiran 5 Angket Penelitian	163
Lampiran 6 Uji Validitas.....	166
Lampiran 7 Uji Validitas.....	170
Lampiran 8 Uji Reliabilitas.....	172
Lampiran 9 Tabulasi Data.....	177
Lampiran 10 Surat Observasi.....	181
Lampiran 11 Surat izin Penelitian.....	182
Lampiran 12 Lembar validasi angket.....	183
Lampiran 13 Dokumentasi Kegiatan	184

ABSTRAK

Elma, Lastiarma Purba. 2023/23230002: “Persepsi Masyarakat dalam Implementasi Prinsip *Good Local Governance* dalam Pengelolaan BUMDes (Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap implementasi prinsip-prinsip *Good Local Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Martabe di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian difokuskan pada lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum, sekaligus mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan strategi peningkatan pengelolaan BUMDes.

Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* dengan pendekatan *sequential explanatory*. Tahap awal pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui angket kepada 92 responden yang dipilih menggunakan *simple random sampling*, kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip transparansi (39%), akuntabilitas (39%), dan partisipasi masyarakat (40%) berada pada kategori rendah. Prinsip efisiensi dan efektivitas (58%) serta supremasi hukum (54%) berada pada kategori sedang. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya mekanisme publikasi laporan keuangan, lemahnya tanggung jawab pengurus terhadap kinerja, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan modal usaha, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran utang-piutang.

Strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BUMDes meliputi: penerapan SOP keuangan secara konsisten, evaluasi rutin kinerja pengurus, peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta edukasi hukum untuk meningkatkan kepatuhan warga. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada konsistensi penerapan seluruh prinsip *Good Local Governance*, yang memerlukan sinergi antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci : BUMDes, *Good Local Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

ABSTRACT

Elma, Lastiarma Purba. 2023/23230002. *Community Perceptions of Good Local Governance Principles in the Management of Village-Owned Enterprises (A Study of BUMDes Martabe in Sabungan Village, Sipahutar District, North Tapanuli Regency)*.

This study aims to examine community perceptions of the implementation of *Good Local Governance* principles in managing the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Martabe in Sabungan Village, Sipahutar District, North Tapanuli Regency. The research focuses on five key governance principles transparency, accountability, community participation, efficiency and effectiveness, and the rule of law while also identifying the challenges, obstacles, and strategies for improving BUMDes management.

A *mixed methods* approach with a *sequential explanatory* design was employed. The initial stage involved quantitative data collection through questionnaires administered to 92 respondents selected using *simple random sampling*, followed by qualitative data collection through in-depth interviews, observations, and documentation.

The findings reveal that the implementation levels of transparency (39%), accountability (39%), and community participation (40%) fall within the low category, while efficiency and effectiveness (58%) and the rule of law (54%) are in the moderate category. Key obstacles include the lack of a structured financial reporting mechanism, weak managerial accountability, limited community participation, restricted business capital, and low compliance in repaying debts to BUMDes.

Recommended strategies to enhance effectiveness and sustainability include consistent application of financial Standard Operating Procedures (SOP), regular performance evaluations, capacity building and community assistance programs, utilization of alternative financing schemes, and legal education to improve compliance. This study emphasizes that the success of BUMDes management depends heavily on the consistent implementation of all *Good Local Governance* principles, requiring strong synergy among managers, village governments, and the community to enable BUMDes to function optimally as a sustainable driver of the village economy.

Keywords: *BUMDes, Good Local Governance, transparency, accountability, community participation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional, hal pertama yang dilakukan adalah penguatan ekonomi di tingkat desa. Desa mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang memberikan peluang bagi warga untuk mengembangkan usaha. Setiap desa sebenarnya memiliki beragam potensi yang dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, desa dituntut untuk mampu mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya secara optimal.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam merealisasikan tujuan negara demi kesejahteraan rakyat, baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Tugas ini mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan cita –cita bangsa (Bachtiar 2019). Dalam hal ini pemerintah harus memastikan adanya peluang yang luas bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, sesuai dengan perintah alinea keempat pembukaan UUD 1945, Pemerintah berkewajiban melindungi seluruh masyarakat indonesia dan tumpah darah indonesia berdasarkan nilai- nilai Luhur Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bangsa.

Potensi daerah merupakan sumber daya asli yang dimiliki oleh desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi desa untuk mengelola

potensi tersebut secara mandiri melalui kewenangan otonom. Salah satu langkah strategis dalam memanfaatkan potensi lokal adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, dan dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti penduduk, aset, dan jasa pelayanan demi kemakmuran masyarakat.

Agar BUMDes berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola yang baik (good governance) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas. Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP bahwa good governance adalah sistem tata kelola yang responsif dan mampu menjalin kerja sama yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes dapat menjadi sarana untuk memperkuat kemandirian desa, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Sabungan yang terletak di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat yang besar jika dikelola dengan baik. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, desa ini telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha, termasuk usaha di bidang keuangan yang mencakup kegiatan ekonomi berskala mikro oleh pelaku usaha desa. Ayat (2) menegaskan bahwa unit usaha tersebut dapat memberikan akses terhadap layanan ekonomi yang mudah dijangkau masyarakat desa, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Landasan hukum ini memberikan ruang bagi BUMDes untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa yang adaptif dan berorientasi pada pemberdayaan.

Di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu BUMDes Sabungan Ni Huta 1 dan BUMDes Martabe. Namun, saat ini hanya BUMDes Martabe yang masih berjalan atau beroperasi saat ini. Meskipun demikian, pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Martabe masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, pengurus BUMDes dinilai kurang terbuka dalam menerima kritik maupun masukan dari masyarakat. Hal ini berdampak pada terbatasnya komunikasi antara pengurus dan warga desa, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program serta kegiatan BUMDes. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif juga menjadi hambatan besar dalam pengembangan usaha desa. Ditambah lagi, persoalan hutang-piutang antar pelaku usaha yang tidak tertata dengan baik

mencerminkan lemahnya sistem manajemen dan belum optimalnya penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 26 November 2025 dengan Salah satu warga di desa sabungan yaitu ibu LS (37), beliau menyampaikan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat sebenarnya ingin terlibat dan mendukung BUMDes, tapi kadang informasi tentang kegiatan atau laporan keuangannya tidak pernah kami dengar. Kalau ada masalah pun, susah disampaikan karena pengurus seolah tertutup.”

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Ibu Boru Simanjuntak, Bendahara BUMDes Martabe, Desa Sabungan Nihuta 2, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Ibu Boru Simanjuntak menjelaskan bahwa :

“Di Kecamatan Sipahutar terdapat dua BUMDes, yaitu BUMDes Martabe dan BUMDes Sabungan Nihuta 1. Saat ini, BUMDes Martabe masih beroperasi dan berkembang, sedangkan BUMDes Sabungan Nihuta 1 mengalami kemunduran hingga tidak beroperasi lagi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah hutang piutang masyarakat yang belum terselesaikan, sehingga membatasi modal usaha dan menghambat pengembangan BUMDes. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes turut menjadi faktor penghambat.”

Ibu Boru Simanjuntak menegaskan pentingnya sistem pengelolaan hutang piutang yang efektif serta peningkatan partisipasi masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Dengan penerapan tata kelola yang baik dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, BUMDes Desa Sabungan diharapkan dapat berkembang dan menjadi contoh bagi desa lain dalam meningkatkan perekonomian desa.

Oleh karena itu, pengembangan BUMDes Martabe ke depan perlu disertai dengan berbagai langkah strategis, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip *good local governance*. Dengan demikian, BUMDes dapat benar-benar menjadi wadah yang efektif dalam mengelola potensi desa secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sabungan.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penerapan *Good Local Governance* atau tata kelola lokal yang baik merupakan aspek fundamental untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha desa. *Good Local Governance* mengacu pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Transparansi menciptakan keterbukaan dalam pengelolaan informasi dan keuangan BUMDes. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari pengelola kepada masyarakat; partisipasi mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan hingga evaluasi; efektivitas dan efisiensi memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal; sementara supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh kegiatan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan kelima prinsip ini menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti kurangnya keterbukaan pengurus, lemahnya komunikasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan BUMDes Martabe.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Persepsi masyarakat dalam implementasi prinsip-prinsip *Good local Governance* dalam pengelolaan BUMDes serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Good local Governance* sangat dibutuhkan sebagai alat untuk menjamin kesinambungan usaha dengan memperhatikan peran dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Persepsi Masyarakat dalam Implementasi Prinsip Good Local Governance Pada Pengelolaan BUMDes : Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara.”***

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap implementasi prinsip-prinsip *good local governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan BUMDes belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kurangnya akses informasi mengenai kegiatan usaha menyebabkan minimnya kepercayaan publik terhadap kinerja pengurus BUMDes.
2. Sikap pengurus yang tertutup terhadap saran atau keluhan masyarakat menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pengelola dan warga

desa, serta melemahkan hubungan kerja sama dalam pengembangan usaha.

3. Rendahnya partisipasi warga dalam mendukung program BUMDes menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip partisipatif. Masyarakat cenderung pasif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan BUMDes.
4. Tidak adanya sistem pengelolaan hutang piutang yang efektif antara pelaku usaha dan BUMDes berdampak pada terhambatnya arus modal dan memperlambat pengembangan unit usaha.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan keterarahan dalam pelaksanaan penelitian, maka ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada BUMDes Martabe yang masih berjalan dan beroperasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Subjek yang menjadi fokus penelitian terbatas pada masyarakat Desa Sabungan dan pengurus BUMDes Martabe, yang terlibat langsung dalam pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan usaha desa. Adapun aspek yang diteliti meliputi persepsi masyarakat terhadap implementasi prinsip-prinsip *good local governance* dalam pengelolaan BUMDes, khususnya pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas dan supremasi hukum. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis operasional secara menyeluruh, melainkan lebih menekankan pada sejauh mana tata kelola yang diterapkan mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi dan pembatasan masalah, yang memberikan pernyataan rinci mengenai ruang lingkup penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana persepsi prinsip –prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi di Desa Sabungan?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk efektivitas dan keberlanjutan BUMDes di Desa Sabungan?

E. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sejauh mana Prinsip- Prinsip Good governance diterapkan dalam pengelolaan BUMDes di Desa sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa.
3. Menyusun strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BUMDes.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi teoritis untuk memahami hubungan antara *good governance* dan terhadap keberhasilan atau kegagalan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa.

2. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian dapat memperkaya kajian akademis terkait penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan dibidang yang sama atau relevan.
- b. Penelitian ini memperkuat kemampuan keterampilan penulis dalam menganalisis dan Implementasi Prinsip *good governance* dalam Pengelolaan BUMDes di Desa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan membina BUMDes lain di wilayahnya, dengan fokus pada implementasi prinsip *good governance* untuk mendorong kemandirian desa.

3. Bagi penelitian selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan masukan untuk mengangkat kembali tema yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda khususnya dalam implementasi Prinsip - prinsip *good governance*.
- b. Penelitian ini membuka peluang untuk memperbaiki dan melengkapi temuan yang belum tercakup secara komprehensif. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian dari persepsi masyarakat dalam prinsip-prinsip *good local governance* dalam pengelolaan BUMDes Martabe menunjukkan capaian yang beragam pada masing-masing indikator, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam implementasi tata kelola yang ideal.
 - a. Prinsip Transparansi memperoleh rata-rata persentase sebesar 39%, yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi penting terkait pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional BUMDes. Kurangnya publikasi laporan keuangan dan minimnya media informasi terbuka menjadi faktor utama rendahnya transparansi.
 - b. Prinsip Akuntabilitas juga berada dalam kategori rendah dengan rata-rata 39%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengurus BUMDes belum secara optimal mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sistem pelaporan berkala dan audit internal belum berjalan secara konsisten.
 - c. Prinsip Partisipasi Masyarakat mencatat persentase rata-rata 40%, juga tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini ditunjukkan dari minimnya keterlibatan warga dalam forum musyawarah, kurangnya

kesempatan menyampaikan pendapat, serta lemahnya kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis BUMDes.

- d. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas menunjukkan hasil yang lebih baik dengan rata-rata 58%, tergolong sedang. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya oleh BUMDes telah dilakukan secara cukup efisien dan mampu menghasilkan output yang berdampak bagi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam aspek perencanaan strategis dan pengembangan unit usaha.
- e. Prinsip Supremasi Hukum menempati posisi kedua tertinggi dengan rata-rata 54%, juga tergolong sedang. Ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap peraturan desa dan aturan hukum terkait, serta telah berupaya menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Namun, penerapan sanksi atau penegakan aturan terhadap pelanggaran, terutama dalam hal utang-piutang masyarakat, masih lemah.

Secara keseluruhan, dari lima prinsip utama *Good Local Governance* yang dianalisis, tiga prinsip (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) masih tergolong rendah, sedangkan dua prinsip (efisiensi-efektivitas dan supremasi hukum) berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengelolaan BUMDes yang lebih profesional, masih dibutuhkan peningkatan signifikan dalam hal keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pengelola, dan keterlibatan masyarakat agar

prinsip-prinsip *Good local Governance* benar-benar terimplementasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. BUMDes Martabe Desa Sabungan yang telah beroperasi sejak 2019 masih menghadapi sejumlah tantangan pada lima prinsip *Good Local Governance*. Pada prinsip transparansi, tantangan utama adalah rendahnya keterbukaan informasi yang menurunkan kepercayaan dan meningkatkan ketidakpedulian masyarakat. Prinsip akuntabilitas terkendala oleh ketiadaan laporan pertanggungjawaban yang terstruktur dan lemahnya sistem evaluasi sehingga keputusan sering tidak berbasis data. Prinsip partisipasi terhambat oleh rendahnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan, serta program yang kurang sesuai kebutuhan. Prinsip efisiensi dan efektivitas terganggu oleh perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan, keterbatasan modal, dan penumpukan stok barang yang tidak laku. Sementara itu, prinsip supremasi hukum dihadapkan pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya pencatatan, dan ketiadaan sanksi tegas. Secara keseluruhan, diperlukan langkah strategis seperti regulasi yang lebih ketat, peningkatan transparansi, dan pelibatan aktif masyarakat melalui forum Musrenbang untuk memperkuat pengelolaan BUMDes yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif.
3. Berdasarkan temuan penelitian, strategi penguatan *Good Local Governance* di BUMDes Martabe Desa Sabungan perlu dirancang

secara komprehensif dan selaras dengan potensi lokal, kapasitas pengelola, serta nilai budaya masyarakat. Pada prinsip transparansi, langkah yang dapat ditempuh adalah publikasi rutin laporan keuangan melalui media desa dan forum dialog triwulanan. Prinsip akuntabilitas diperkuat melalui penyusunan laporan yang mudah dipahami, pelatihan literasi keuangan, pembentukan tim evaluasi internal, audit berkala, dan forum refleksi publik. Prinsip partisipasi ditingkatkan melalui pembentukan lembaga pengawasan masyarakat dan forum diskusi rutin yang memfasilitasi pelatihan serta sosialisasi peran BUMDes. Prinsip efisiensi dan efektivitas dijalankan dengan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti KUR dan hibah, serta pemetaan usaha potensial untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran. Sementara itu, prinsip supremasi hukum diperkuat dengan penagihan persuasif kepada debitur, pemerataan distribusi pinjaman, dan edukasi pengelolaan dana yang produktif. Strategi-strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan daya saing BUMDes secara inklusif.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan lebih aktif dalam memberikan pengawasan, pembinaan, dan dukungan anggaran terhadap operasional BUMDes. Peran ini penting untuk mendorong terciptanya tata kelola yang

sesuai prinsip *Good Local Governance* serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa.

2. Bagi pengurus BUMDes

Disarankan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan transparansi dalam pelaporan keuangan melalui pelatihan rutin dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengurus juga perlu menyusun dan menerapkan SOP keuangan yang jelas, agar semua proses dapat terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendukung kegiatan dan program BUMDes. Masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan BUMDes perlu lebih terlibat dalam perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan agar BUMDes menjadi milik bersama yang dikelola dengan tanggung jawab kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Juhari Sasmito, Dian Retnaningdiah, and Kemala Hayati. 2022. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Bumdes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 7(2):155–62.
- Amin, Mohammad Nashihul. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tembelang Tahun 2020." *Jurnal PKN*.
- Ardiyansyah, Choironi, and David Pesudo. 2022. "Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Dan Akuntabilitas Bumdes." *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 1(2):38–55.
- Arifin, Rama Nurul, Andi Wijayanto, and Dinalestari Purbawati. 2023. "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 12(4):977–85.
- Arindhawati, Aulia Tafhana, and Evy Rahman Utami. 2020. "Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten)." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4(1):43–55.
- Azhari, Devi Syukri, Zihnail Afif, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2):8010–25.
- Bachtiar, Basron. 2019. "Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 4(3).
- Budiaji, Weksi. 2013. "Skala Pengukuran Dan Jumlah Respon Skala Likert." *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan* 2(2):127–33.
- Daempal, Avelini Vanne, Ivonne S. Saerang, and Victoria N. Untu. 2022. "Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Boloak)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10(4):1751–60.

- Dewi, Riska Chyntia, and Suparno Suparno. 2022. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7(1):78–90.
- Faharudin, Faharudin. 2023. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Prinsip Good Governance." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1(1):1–9.
- Febryany, Anggi, Herijanto Bkti, and Slamet Usman Ismanto. 2023. "Manajemen Badan Usaha Milik Desa Mitra Maju Sejahtera Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor." *JANE-Jurnal Administrasi Negara* 14(2):581–92.
- Hamid, Ahmad Munir, and Moh Sam Bagus Ady Maulindra. 2019. "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi Di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 2(2):1–22.
- Heriyanto, Anas. 2015. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman." *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Hestiana, Agustri, Faridah Faridah, and Romdana Romdana. 2024. "ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA (DI DESA GELOMBANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS (SAM) KABUPATEN SELUMA)." *Journal of Governance and Public Administration* 1(2):133–49.
- Hutami, Wanda Femila. 2024. "Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Public Relations Mercu Buana, Query Date* 21:23.
- Indriyanthi, Ni Nyoman Ira, Wirawan Suhaedi, and Linda Sari. 2021. "Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 1(4):13–26.
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance." *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1):1–17.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi."
- Mulyana, Hilmawan Indra, R. Rindu Garvera, and Ii Sujai. 2024. "Strategi BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes." *Papsel Journal of Humanities and Policy* 1(2):125–35.
- Nugraha, Andika Alam, and Juhari Sasmito Aji. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa: Studi Terhadap Desa

- Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020.” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 1–13.
- Pardede, Piki Darma Kristian, Feliks Buulolo, and Arinus Zai. 2022. “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN BUMDes SADANIOGA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO.” *JURNAL GOVERNANCE OPINION* 7(2):26–40.
- Phahlevi, Rifqi Ridlo, Sri Budi Purwaningsih, Ilmi Usrotin Choiriyah, and Moh Faizin. 2022. “Optimizing the Role of BUMDes in Developing MSMEs in Lemujud Village Good Corporate Governance.” *Procedia of Social Sciences and Humanities* 3:1337–40.
- Pradana, Herry Azhar, and Siska Fitriyanti. 2019. “Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 14(2):133–46.
- Rauf, Nuzmerini, Sitti Husna Noviana Djou, Maman Musa, Siskawaty Yahya, Siske Anani, and Darman Darman. 2024. “Pemberdayaan Bumdes: Solusi Inovatif Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa.” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(5):8743–49.
- Rosmaida, Mifta, and Susi Handayani. 2022. “Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6(2):697–715.
- Setiawan, Dedek, and Risma Wira Bharata. 2022. “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance (Bumdes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2(6):439–46.
- Setiyani, Asri. 2023. “Prinsip Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.(Principles of Good Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sedati Agung Village, Sedati District, Sidoarjo Regency).”
- Sofyan, Ayi Yayan, Ipah Ema Jumiati, and Delly Maulana. 2022. “Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 10(2):292–308.
- SOLEHAH, SITI AYU. 2024. “ANALISIS TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMANFAATAN POTENSI DESA MUARA JAMBI.”

- Solehah, Siti Ayu. 2024. "Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi."
- Syahri, Andi Alim. 2014. "Statistika Pendidikan." *SIGMA (Suara Intelektual Gaya Matematika)* 6(2):127.
- Tomisa, Muhammad Elsa, and M. Syafitri. 2020. "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9(1):91–101.
- Trihastuti, Lea Ayu. 2022. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa Asung Daya Jatijajar."
- Wibawa, I. Gede Agus, and Lilik Antarini. 2020. "Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 5(1):57–71.
- Yasa, Ketut Sukarma. 2023. "ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)(Studi Kasus Pada BUMDes Desa Bontihing)."
- Yuliana, Elfrida, and Natasia Alinsari. 2022. "Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6(3):2919–29.